

IMPLEMENTASI INVENTARISASI TANAH KASULTANAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:

Biyana Tirta Wanadhi¹ dan Rizky Septiana Widyaningtyas²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kasultanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, untuk mengetahui indikator yang digunakan dalam pemetaan wilayah pada kegiatan inventarisasi yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 serta akibat hukum yang ditimbulkan pada kegiatan tersebut.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif-empiris mengandung sifat penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian lapangan dilakukan untuk menemukan secara spesifik dan nyata tentang kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode wawancara. Setelah data-data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan inventarisasi ini didasarkan pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Dalam proses inventarisasi tanah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan pada peta desa lama tahun 1938, serta data pada kelurahan. Kegiatan inventarisasi ini difasilitasi oleh dinas-dinas terkait dari tingkat provinsi sampai dengan desa. Dalam proses inventarisasi ini akan menghasilkan sertifikat hak milik tanah Kasultanan. Namun, sampai sekarang belum ada tanah-tanah yang diturunkan haknya karena dampak inventarisasi tanah kasultanan. Apabila kedepannya tanah-tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah dilekati hak namun berdasarkan asal-usulnya merupakan tanah Kasultanan maka akan diturunkan statusnya haknya. Tetapi hal itu belum terjadi karena belum disahkannya payung hukum untuk penurunan hak tersebut.

Kata Kunci: Inventarisasi Tanah Kasultanan, *Sultan Ground*, Fasilitasi, Penurunan Hak Atas Tanah.

¹ Mahasiswa Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



**THE IMPLEMENTATION OF SULTAN'S LAND INVENTORY IN SPECIAL REGION OF
YOGYAKARTA BASED ON ACT NO.13 OF 2012 ABOUT THE SPECIALTY OF THE
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**

By:

Biyana Tirta Wanadhi³ dan Rizky Septiana Widyaningtyas⁴

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze Sultan's land inventory in Special Region of Yogyakarta, then to know the indicators that used to map the territory on the act of inventory after the implementation of Act No.13 of 2012 and the impact that caused as the result from that inventory based on the Law aspect.

The scientific approach used in this research are the combination of the normative and empiric approach. Normative-empiric approach consist of the literature and field research. Literature research is conducted to obtain the data by using primary, secondary, and tertiary legal material. Field research is conducted to find the data about the community using the interview method specifically and naturally. After all the data has been gathered, then the data were analyzed by using qualitative method.

Based on the result of the said research, this implementation of the inventory is based on the Act of Specialty No.13 of 2012. Land inventory of all the Special Region of Yogyakarta is based on the map of old village of 1938 plus the data from the sub-district. This act of inventory is facilitated by the related service from the village until the province. This act of inventory will be resulting a certificate that stated a Sultan's land right. But, until now, there are no lands that being given their rights because of the said act. However, if, in the future, lands in the Special Region of Yogyakarta that has been attached their rights but based on their origin are the Sultan's land, then the status of the said land will be lowered. But that case has never happened before, because there was not any law that regulate that case.

Keywords: Sultan's land inventory, Sultan's Ground, Facility, the lowering of right of land

³ Scholars of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturers of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada